



2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



KATA PENGANTAR

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis dimaksud diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman. Laporan kinerja, menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran serta inovasi yang ada dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016-2021. Selanjutnya, untuk menjamin optimalisasi pencapaian sasaran, Dinas Perumahan dan Permukiman telah mengintegrasikan sistem manajemen kinerja dengan manajemen risiko. Dimana atas risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran telah diidentifikasi dan disiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk mengatasinya

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan.

Balikpapan 28 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas



Suparto

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memperhatikan program prioritas daerah dan isu- isu strategis bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkini, serta mengacu pada Rentra Dinas Perumahan dan Permukiman 2016-2021 dalam menyusun sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. PK Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 merupakan implementasi dari 4 program prioritas, yaitu Program Kawasan Permukiman Perumahan, Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Perjanjian kinerja ini ditetapkan ke dalam 5 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja sasaran.

Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2021		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0	0	0
Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan	75	39,17	147,77
Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	0,83	0,26	168,67
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,022	0,10	454,55
Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan permakaman	98	100	102,4

Kinerja Keuangan Tahun 2021

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2020 adalah Rp.2.383.745.725,00 atau sebesar 91,67 % dari target sebesar Rp. 2.600.264.600,00. Anggaran belanja Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebesar Rp 43.058.179.118,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.010.937.135,41 atau 90,60 % dengan silpa sebesar Rp. 4.047.241.982,59

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR TABEL	IV
BAB I .PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Tugas danFungsi	1
C. StrukturOrganisasi	2
D. Isu Strategis	3
E. SistematikaPenyajian	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. PerencanaanStrategis	6
B. Rencana KinerjaTahunan	8
Kebijakan	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	15
2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	22
3. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Dan Permukiman.....	23
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	23
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	25
B. RealisasiAnggaran	45
C. Capaian Prestasi danpenghargaan	53
BAB IV. PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021	II
Tabel 2. Target Kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Tahun 2016 - 2021	7
Tabel 3. Target Kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Tahun 2021	9
Tabel 4. Program Dan Kegiatan Dinas Perumahan Dan Permukiman.....	10
Tabel 5. Uraian Dan Formulasi Iku Dinas Perumahan Dan Permukiman	13
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perumahan Dan Permukiman	15
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 8. Jumlah Peningkatan Kualitas Rtlh Berdasarkan Sumber Dana Bantuan	19
Tabel 9. Luas Ruang Terbuka Hijau Di Kota Balikpapan	20
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	22
Tabel 11. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini	23
Tabel 12. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan.....	38
Tabel 13. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Dan Permukiman Tahun 2021	45
Tabel 14. Tabel Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	46

Bab I .Pendahuluan

A. LatarBelakang

Dinas perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai organisasi pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBD sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

B. Tugas danFungsi

Dasar pembentukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Balikpapan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
2. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
3. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman

- kumuh;
4. pengoordinasian penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
 5. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permukiman;
 6. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
 7. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervise penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
 8. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
 9. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 10. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 11. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 12. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 13. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan;
 14. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
 15. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 16. pembinaan dan pengendalian UPT;
 17. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 18. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

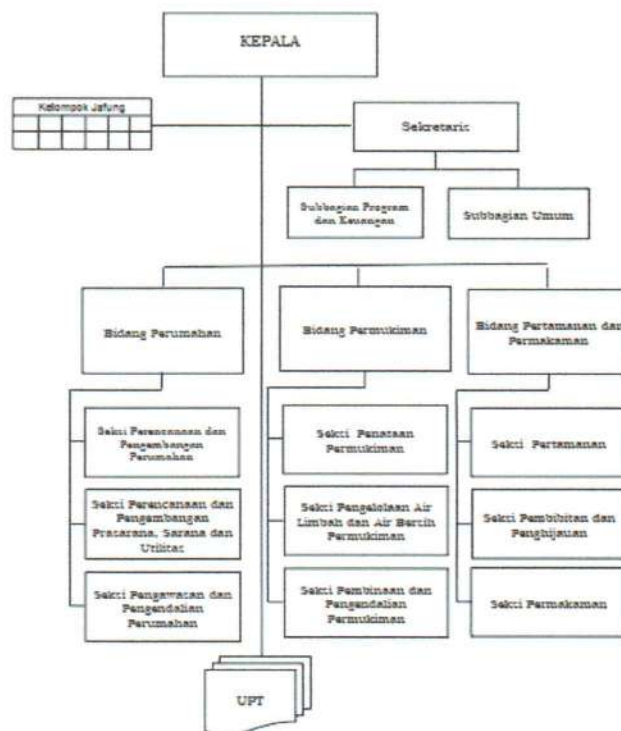
2. Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum;

3. Bidang Perumahan membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana, Sarana,
 - c. Utilitas dan
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
- 4. Bidang Permukiman membawahkan:**
- a. Seksi Permukiman;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman
- 5. Bidang Pertamanan dan Permakaman membawahkan:**
- d. Seksi Pertamanan;
 - e. Seksi Permakaman; dan
 - f. Seksi Pembibitan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; UPT Rumah Susun Sewa**
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman



D. Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJMD Kota Balikpapan, Renstra Disperkim dan RTRW Kota Balikpapan), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) dengan OPD terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan.

Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (output) dari program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, tetapi identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (outcome) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas. Berpijak pada uraian di atas, dengan mendasarkan pada evaluasi internal organisasi, studi kepustakaan dan olah data, hasil kajian dan diskusi dalam forum-forum koordinasi antar pemangku kepentingan, serta hasil pengamatan selama menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mengidentifikasi permasalahan yang ada terkait bidang urusan yang ditangani dan memetakannya sebagai berikut :

1. Tingginya *backlog* perumahan

Pemerintah tengah berjuang mengatasi masalah defisit atau *backlog* perumahan yang disebabkan tidak seimbangnya antara pasokan (suplai) dan permintaan (kebutuhan). Jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah lebih banyak dari pasokan rumah yang bisa disediakan tiap tahun, sehingga diperlukan sejumlah terobosan untuk mengatasi *backlog* perumahan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/ disediakan dan prasarana dasar yang ada, ditambah lagi dengan semakin tingginya arus perpindahan penduduk yang masuk ke Kota Balikpapan menyebabkan masalah *backlog* perumahan menjadi isu utama yang harus ditangani dengan maksimal.

2. Masih perlunya penanganan lebih lanjut kawasan permukiman kumuh. Meskipun pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan dinyatakan bebas kumuh berdasarkan data basis baseline KOTAKU, namun masih banyak tugas penanganan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara maksimal. Dari tujuh indikator kumuh masih ada beberapa indikator yang belum tersentuh seperti masalah ketidakteraturan bangunan, proteksi kebakaran, sanitasi dan rumah tidak layak huni. Sanitasi sebagai

salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tinggi tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah.

3. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni.

Berkaca dari penanganan kawasan kumuh di kota Balikpapan yang ditangani, salah satunya bisa disebabkan karena masih adanya rumah tidak layak huni, yang secara tidak langsung menjadi salah satu pemicu suatu permukiman menjadi kumuh. Masih adanya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Balikpapan diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman selama tahun 2021, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penulisan LKJIP; kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman; serta struktur organisasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

BAB II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman selama tahun 2016-2021, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2021, serta realisasi anggaran.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman serta strategi pemecahan masalah.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang memuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan, Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2019 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

A. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitaskinerja.

Memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Periode Tahun 2016-2021, yaitu "Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman", yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya SaingTinggi
2. Mewujudkan Kota Layak Huni yang BerwawasanLingkungan
3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yangRepresentatif
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yangKreatif
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yangBaik

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan, terutama pada misi ke dua yaitu: **“Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan”**, menjadi acuan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk membangun Kota Balikpapan, karena indikator misi kedua tersebut merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan harus disukseskan untuk dicapai.

Dalam kaitan hal tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi yang ingin dicapai satu sampai lima tahun secara berkesinambungan.

VISI

Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah **“TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI”**

MISI

Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat danBerkualitas.
2. Menyediakan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Layak danMerata.
3. Meningkatkan Layanan Ruang Terbuka Hijau(RTH).

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Perumahan dan Permukiman disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Target Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	%	2,45	2,41	2,37	2,32	2,28	2,23
Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan	Mengurangi Backlog Perumahan	Prosentase Penurunan Backlog Perumahan	%	89	83	81	79	77	75
	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83
Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	%	0,011	0,011	0,014	0,017	0,019	0,022
	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman	%	90	92	94	95	96	98

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021 memerlukan penjabaran dari sasaran strategis diatas harus dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh pegawai, maka akan dijabarkan sebagai berikut:

Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategis dan kebijakan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Strategi :

- a. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
- b. Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman
- c. Mendorong Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Fasilitasi Pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni
- e. Meningkatkan Jumlah Fasilitas dan Pelayanan Sanitasi
- f. Pembangunan Taman kota baru
- g. Perbaikan Layanan Permakaman

Kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan dengan strategi yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Permukiman untuk mencegah kawasan kumuh baru.
- b. Pengentasan wilayah rawan sanitasi dan perluasan pelayanan sanitasi.
- c. Penerapan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.

Secara singkat Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Target Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	0 %
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	75 %
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	0,83%
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Taman yang Terkelola dan Terpelihara	0,022 %
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Areal Permakaman yang Terkelola dan Terpelihara	98 %

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka direalisasikan melalui program dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Program-program yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun 2021 telah melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman
			Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha
			Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Permukiman Kumuh
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	Program Pengembangan perumahan
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus
			Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Urusan Penyelenggaraan PSU
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Program Kawasan Permukiman
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Urusan Penyelenggaraan PSU
			Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabattersebut.

Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan dibidang perumahan dan permukiman dan merupakan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan reward or punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target dan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan kegiatan.

Pada Bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Adapun uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman adalah uraian sebagai berikut:

Tabel 5. Uraian dan Formulasi IKU Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi IKU
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Rencana Luas Kawasan Permukiman Pada RTRW}}$
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	$\frac{\text{Jumlah Backlog}}{\text{Jumlah Rumah}}$
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}}$
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	$\frac{\text{Luas Taman}}{\text{Luas Kawasan Perkotaan}}$
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan Permakaman	$\frac{\text{Ahli Waris yang merasa puas}}{\text{Ahli waris yang mengajukan pelayanan}}$

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (Lima) indikator merupakan indikator kinerja sasaran (PK Eselon II) yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rencana

Namun dalam perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rencana

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rencana

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil Capaian kinerja >70 sd <85% :

Berhasil Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil Capaian kinerja < 55 sd 0% :

Tidak berhasil

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis. Adapun kelima sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	0
2	Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan	%	75
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	0,83
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	%	0,022
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	%	98

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pengembangan Perumahan	Rp 4.155.000.000	APBD
Program Kawasan Permukiman	Rp 2.301.511.000	APBD, DAK
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 23.550.590.916	APBD
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 1.853.467.000	DAK
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 11.197.610.202	APBD

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan

Permukiman Kota Balikpapan tahun 2021 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi dan capaian dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2021		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0	0	0
Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan	75	39,17	147,77
Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	0,83	0,26	168,67
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,022	0,10	454,55
Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan permakaman	98	100	102,4

Analisis Capaian Sasaran Strategis

a. Realisasi pencapaian indikator sasaran yaitu persentase berkurangnya luas Kawasan kumuh sebesar 0 % diperoleh dari:

$$\text{Persentase berkurangnya} = \frac{\Sigma \text{Luas Kawasan Kumuh}}{\Sigma \text{Rencana Luasan Kawasan Permukiman pada RTRW}} \times 100\%$$

$$\text{Luas Kawasan kumuh} = \frac{0}{11.500} \times 100\%$$

$$= 0 \times 100\%$$

$$= 0\%$$

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \underline{\text{tidak ada pencapaian kinerja}}$$

Realisasi sebesar 0 % pada indikator kinerja utama penurunan luasan kawasan kumuh dikarenakan pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan telah dinyatakan bebas kumuh berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan sebesar 0 ha dari sisa 58,58 ha berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No.188.45-285/2019 tanggal 18 September 2019. Atas dasar SK tersebut, maka tidak ada kegiatan dengan tuntutan kinerja penurunan luasan kawasan kumuh diatas skor kumuh 19. Meskipun nilai skor kumuh sudah dibawah 19, masih terdapat tugas Disperkim dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar air minum dan prasana dan sarana

pengelolaan air limbah.

Atas dasar hal tersebut, kegiatan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2021 hanya berupa penanganan kumuh dibawah skor kumuh 19 yang terdiri atas:

1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 1.853.467.000,00 yang berasal dari DAK
2. Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan anggaran Rp. 437.000.000,00 dan terealisasi Rp. 404.783.470,00. Kegiatan ini terdiri atas penyusunan dokumen RP2KPKPK dan Pendampingan DAK

Pada tahun 2020, kembali dikeluarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-326/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan tanggal 20 November 2020. SK ini memuat kawasan permukiman kumuh baru di Kota Balikpapan. Kawasan permukiman kumuh baru ini baru akan ditangani pada RPJMD atau Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman periode 2021-2026 dengan berbagi kewenangan bersama- sama Permerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.

Permasalahan yang dihadapi:

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan adalah terdapatnya pengurangan prasarana pengelolaan air limbah berupa sambungan rumah yang telah diupayakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dikarenakan kurangnya pengawasan pihak berwenang di wilayah prasarana tersebut. Kurangnya pengawasan dan evaluasi ini menyebabkan rendahnya tingkat pemeliharaan prasarana pengelolaan air limbah oleh masyarakat pengguna sistem terpusat. Diperlukan penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sanitasi secara berkelanjutan dari pihak- pihak terkait agar Prasarana pengelolaan air limbah yang telah terpasang tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik.

b. Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase Penurunan *Backlog*

Perumahan sebesar 147,77% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Backlog} &= \frac{\Sigma \text{Backlog}}{\Sigma \text{Rumah}} \times 100\% \\ &= \frac{94.039}{240.079} \times 100\% \\ &= 39,17\% \\ \text{\% Pencapaian Kinerja} &= \frac{75 - (39,17 - 75)}{75} \times 100\% \end{aligned}$$

=147,77 %

Backlog perumahan diartikan sebagai suatu kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, *backlog* Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. *Backlog* Perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah persatu rumah tangga atau kepala keluarga.

Data *backlog* kepemilikan rumah kota Balikpapan tahun 2021 sebesar 94.039 unit, menggambarkan masih tingginya tingkat kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan. Salah satu penyebab tingginya angka *backlog* perumahan ini disebabkan rendahnya pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah maupun swasta. Solusi untuk mengatasi *backlog* perumahan ini antara lain adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perumahan dan perlunya skema skema pembiayaan perumahan yang tepat.

Diperlukan peran aktif seluruh stakeholder di bidang perumahan untuk menyelesaikan permasalahan *backlog* perumahan, antara lain Pemerintah kota dalam hal perijinan dan penetapan tata ruang, pengembang untuk meningkatkan pembangunan rumah dengan harga yang terjangkau serta masyarakat itu sendiri untuk membangun rumah yang layak huni secara swadaya. Pemerintah Kota perlu juga diharapkan untuk terus mendorong pengembang agar membangun rumah murah serta mentaati peraturan tentang pola pembangunan hunian berimbang seperti apa yang tertuang dalam RTRW Kota Balikpapan. Pengembang diharapkan tidak hanya membangun rumah mewah saja, tapi mereka juga harus ikut memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan membangun rumah sederhana.

Tingginya angka realisasi *backlog* perumahan tahun 2021 sebesar 94.039 unit, tetap menyumbang pencapaian kinerja yang sangat baik bagi Dinas Perumahan dan Permukiman. Persentase penurunan *backlog* perumahan yang ditargetkan sebesar 75 % ternyata mampu dicapai hingga penurunan *backlog* perumahan sebesar 39,17%

Keberhasilan pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan dengan anggaran Rp. 4.155.000.000,00 mampu terealisasi Rp. 3.383.523.057,12 atau sebesar 81,43%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

1. Tersedianya Rumah Susun Sederhana dari Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat Sembilan Rusunawa yang tersebar di Kota Balikpapan dengan daya tampung rata-rata 96 kamar perrusunawa
2. Pelaksanaan Program Sejuta Rumah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah baru/khusus dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD.
3. Program rumah umum oleh pengembang yang difasilitasi atau disubsidi lewat

APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Alokasi anggaran APBN maupun APBD untuk sektor perumahan, masih rendah
- b. Realisasi jumlah unit rumah yang terfasilitasi dengan pembiayaan KPR FLPP masih relatif rendah

c. Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penurunan rumah tidak layak huni sebesar 165,48% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penurunan} &= \frac{\Sigma \text{Rumah Tidak Layak Huni}}{\Sigma \text{Rumah}} \times 100\% \\
 \text{Rumah tidak layak huni} &= \frac{630}{240.079} \times 100\% \\
 &= 0,26\% \\
 \text{\% Pencapaian Kinerja} &= \frac{0,83 - (0,26 - 0,83)}{0,83} \times 100\% \\
 &= 168,67\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data terbaru dari pekerjaan pendataan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2021 diperoleh hasil bahwa terdapat 630 rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan. Ini artinya dari target 1.015 RTLH di tahun 2021 ternyata menurut data terakhir bidang permukiman tahun 2021 hanya tersisa tersisa 630 unit.

Pencapaian target kinerja tersebut diakomodir melalui kegiatan:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 1.864.511.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.835.926.575,00. Kegiatan ini bersumber dari DAK . Kegiatan ini meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 91 unit rumah.
2. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 100 unit rumah.
3. Bantuan dari Pemerintah Pusat dengan sumber dana APBN sebanyak 159 unit rumah.

Tabel 8. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH Berdasarkan Sumber Dana Bantuan

No	Sumber Dana	Jumlah Rumah
1	DAK	91
2	APBN	159
3	Provinsi Kalimantan Timur	100

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Hasil verifikasi calon penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. Proses verifikasi dilakukan dengan teliti, sehingga tidak ada calon penerima bantuan yang mengundurkan diri saat kegiatan sudah berjalan.
2. Kerjasama semua pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

d. Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penyediaan taman kota sebesar 526 % dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Persentase penyediaan taman kota} &= \frac{\Sigma \text{Luas Taman Kota}}{\Sigma \text{Luas Kawasan Perkotaan}(354,62\text{km}^2)} \times 100\% \\ &= \frac{340.396}{354.620.000} \times 100\% \\ &= 0,10\% \\ \text{\%Pencapaian Kinerja} &= \frac{0,10}{0,022} \times 100\% \\ &= 454,55\% \end{aligned}$$

Pencapaian target kinerja penyediaan taman kota berhasil memenuhi target sebesar 454,55 %. Keberhasilan pencapaian yang besar terhadap penyediaan taman kota ini dikarenakan adanya penyerahan PSU berupa RTH di Perumahan Balikpapan Permai dan di Perumahan Balikpapan Baru kepada Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2020

Berikut jumlah keseluruhan RTH di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2021

Tabel 9. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas (m ²)
1.	Balikpapan Tengah	6.201
2.	Balikpapan Utara	56.595,95
3.	Balikpapan Selatan	235.897
4.	Balikpapan Timur	30.400
5.	Balikpapan Barat	416,21
6.	Balikpapan Kota	10.886
J U M L A H		340.396,16

Adapun kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian target kinerja yaitu

sebagai berikut:

1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, dengan anggaran Rp. 23.550.590.916,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.067.980.840,38 (93,71%). Kegiatan ini mengakomodir peningkatan sarana dan prasana taman kota Balikpapan, peningkatan sarana dan prasarana pembibitan tanaman hias/ peneduh.

e. Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman 104,17% dengan predikat sangat berhasil diperoleh dari:

Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman

$$= \frac{\Sigma \text{Ahli waris yang merasa puas}}{\Sigma \text{Ahli waris yang mengajukan pelayanan}} \times 100\%$$

$$\frac{2.261 \times 100\%}{2.261}$$

$$= 100 \%$$

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{100}{98} \times 100\%$$

$$= 102,4 \%$$

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang meliputi kegiatan operasional pendukung pemeliharaan permakaman di kota Balikpapan.

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Secara Umum masyarakat yang mengajukan pelayanan permakaman tidak pernah mengajukan komplain atau kecewa atas pelayanan permakaman, sehingga bisa dijadikan acuan yang mendukung kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
2. Terlaksananya SOP Permakaman sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semua proses pelayanan permakaman kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
3. Koordinasi dan konsultasi, kegiatan koordinasi memegang peranan penting dalam

menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kordinasi dan konsultasidilaksanakan baik bersifat intern maupun dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan (Dinas/Instansiterkait).

- Keberhasilankinerjayangdicapaisampaisejauhini dipengaruhiSDMyang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan termasuk para petugas lapangan di permakaman yang tersebar di kotaBalikpapan.

Permasalahan yang dihadapi:

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- Terbatasnya lahan permakaman yang dapat disediakan pemerintahKota.
- Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur permakaman seperti pemakaian mobil jenazah dan kegiatan gali kubur ataupun proses memindahkankerangka.
- Tingginya angka kematian di tahun 2021, mengakibatkan dituntutnya kerja keras yang lebih dari seksi permakaman agar permakaman khususnya dengan protokol covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik,cepat , efektif dan efisien.

2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2021 dengan tahun lalu, adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi		Capaian	
			2020 (%)	2021 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0	0	0	0	0
2	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	77	45,70	39,17	140,65	147,77
3	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,84	0,29	0,26	165,48	168,67
4	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,019	0,10	0,10	526	454,55

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi		Capaian	
			2020 (%)	2021 (%)	2020 (%)	2021 (%)
5	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	96	100	100	104,17	102,04

3. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Dan Permukiman

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2021 dengan target akhir Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir Perencanaan Strategis

Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2021	
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
Mengurangi Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0	0	0	2.23	100
Mengurangi <i>Backlog</i> Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	75	39,17	147,77	75	147,77
Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0.83	0.26	168.67	0.83	168.67
Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0.022	0.10	454,55	0.022	454,55
Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	98	100	102,04	98	102,04

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2021 disajikan sebagai berikut;

1. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran pertama yaitu Mengurangi Luas

Kawasan Kumuh saat ini dengan menggunakan indikator persentase berkurangnya luas kawasan kumuh memiliki target 2,23 % pada tahun 2021. Pada akhir tahun 2019 Kota Balikpapan telah dinyatakan bebas kumuh berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 Tingkat Kota Balikpapan sebesar 0 ha dari sisa 58,58 ha berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No.188.45-285/2019 tanggal 18 September 2019. Atas dasar SK tersebut, maka target penurunan luasan kumuh menjadi 2,23% pada tahun 2020 telah terlampaui menjadi 0 Ha. Bahkan target akhir Renstra 2016-2021 sebesar 2,23 % dengan dasar SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-667/ 2014 Tentang Lokasi Penetapan Perumahan Kumuh dan Perkumuhan Kumuh di Kota Balikpapan dengan Luasan 282,Ha pun telah terlampaui di 2019. Oleh karena itu, pada tahun 2021 tidak ada kegiatan dengan tuntutan kinerja penurunan luasan kawasan kumuh diatas skor kumuh 19.

Meskipun nilai skor kumuh sudah dibawah 19, masih terdapat tugas Disperkim dan Pokja PKP dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar air minum dan prasana dan sarana pengelolaan air limbah. Pada tahun 2020, kembali dikeluarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-326/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan tanggal 20 November 2020. SK ini memuat kawasan permukiman kumuh baru di Kota Balikpapan. Kawasan permukiman kumuh baru ini baru akan ditangani pada RPJMD atau Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman periode 2021-2026 dengan berbagi kewenangan bersama- sama Permerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.

2. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran kedua yaitu mengurangi backlog perumahan saat ini dengan menggunakan indikator persentase penurunan *backlog* perumahan Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan realisasi yaitu dari penurunan 45,70 % menjadi 39,17 %. Realisasi tahun 2021 tetap berhasil melampaui target pengurangan *backlog* di tahun 2021 yaitu penurunan *backlog* perumahan menjadi 75%. Terjadinya kenaikan realisasi dari tahun kemarin dikarenakan adanya penambahan jumlah rumah milik sendiri sejumlah 2.303 unit rumah di tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah rumah milik sendiri di tahun 2021. Kenaikan jumlah unit rumah milik sendiri salah satunya berkat adanya program sejuta rumah untuk masyarakat MBR.
3. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran ketiga yaitu mengurangi persentase rumah tidak layak huni saat ini dengan menggunakan indikator persentase rumah tidak layak huni. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan realisasi yaitu dari penurunan 0,29 % menjadi penurunan 0,26%. Keberhasilan peningkatan target kinerja tersebut merupakan hasil dari pada intervensi kegiatan fisik yang bersumber Dana Alokasi Khusus, APBN dan juga APBD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran keempat yaitu meningkatnya

penyediaan taman kota saat ini dengan menggunakan indikator persentase penyediaan taman kota. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya, realisasi tetap diangka 0,10%. Penganggaran tahun 2021 tidak menambah luasan taman kota. Penganggaran hanya ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana taman kota serta pemeliharaan taman -taman. Capaian kinerja yang tinggi dibandingkan target kinerja yang direncanakan disebabkan adanya penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) berupa RTH di Perumahan Balikpapan Permai dan di Perumahan Balikpapan Baru kepada Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2020.

5. Pengukuran capaian realisasi dari sasaran kelima yaitu meningkatnya pelayanan permakaman saat ini dengan menggunakan indikator persentase ahli waris yang puas terhadap layanan permakaman. Berdasarkan angka realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya terdapat kesamaan angka realisasi yaitu 100 %. Keberhasilan mempertahankan kinerja yang baik untuk sasaran strategis ini di sebabkan oleh Secara Umum masyarakat yang mengajukan pelayanan permakaman tidak pernah merasa kecewa atas pelayanan permakaman, sehingga bisa dijadikan acuan yang mendukung kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Terlebih dalam situasi pandemic covid-19 seperti ini, pelayanan permakaman baik secara protokol *covid-19* maupun *non covid* tetap dapat dilakukan secara optimal. Keberhasilan kinerja yang dicapai sampai sejauh ini dipengaruhi SDM yang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan termasuk para petugas lapangan di permakaman yang tersebar di kota Balikpapan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2021. Berdasarkan pagu definitif TA 2021, anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebesar Rp.43.058.179.118,00 dengan realisasi mencapai Rp. 39.010.937.135,41 atau 90,60 %.

Tabel 12. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pada dinas perumahan dan permukiman kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2		4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Program Kawasan Permukiman	Rp437.000.000	Rp404.783.470	92,63%		
						Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp437.000.000	Rp404.783.470	92,63%		
						Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Rp165.000.000	Rp151.596.370	91,88%		
						Pembentukan/Peminaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Permukiman Kumuh	Rp272.000.000	Rp253.187.100	93,08%		
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp1.853.467.000	Rp1.853.467.000	100,00%		
						Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.853.467.000	Rp1.853.467.000	100,00%		
						Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	Rp1.853.467.000	Rp1.853.467.000	100,00%		
1		Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	0	0	0					92,39%	-92,39%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2		4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Permukiman					
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp11.197.610.202	Rp9.465.256.193	84,53%		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.146.400.540	Rp5.530.482.355	89,98%		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.146.400.540	Rp5.530.482.355	89,98%		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp510.856.508	Rp455.693.317	89,20%		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp12.000.000	Rp11.682.000	97,35%		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp243.094.008	Rp203.795.150	83,83%		
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp105.762.500	Rp90.915.000	85,96%		
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp150.000.000	Rp149.301.167	99,53%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator		
1	2		4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp200.500.000	Rp196.552.400	98,03%		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp200.500.000	Rp196.552.400	98,03%		
						Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp686.114.404	Rp489.537.481	71,35%		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.500.000	Rp3.500.000	63,64%		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp231.525.000	Rp88.106.837	38,05%		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp449.089.404	Rp397.930.644	88,61%		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.653.738.750	Rp2.792.990.640	76,44%		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	Rp60.375.000	Rp10.159.211	16,83%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2		4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Lapangan					
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp3.424.852.500	Rp2.624.209.836	76,62%		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Rp168.511.250	Rp158.621.593	94,13%		
						Program Pengembangan perumahan	Rp4.155.000.000	Rp3.383.523.057	81,43%		
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	Rp3.900.000.000	Rp3.139.164.983	80,49%		
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Rp100.000.000	Rp97.851.800	97,85%		
			75	39,17	147,77%	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	Rp3.800.000.000	Rp3.041.313.183	80,03%		
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan				Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Rp255.000.000	Rp244.358.074	95,83%	90,19%	57,58%
						Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Rp255.000.000	Rp244.358.074	95,83%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran					Tingkat Efisiensi		
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja per Indikator	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	14 (6-13)			
												4	5
1	2					8							
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp50.000.000	Rp46.656.050	93,31%				
						Urusan Penyelenggaraan PSU	Rp50.000.000	Rp46.656.050	93,31%				
						Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	Rp50.000.000	Rp46.656.050	93,31%				
						Program Kawasan Permukiman	Rp1.864.511.000	Rp1.835.926.575	98,47%				
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,83	0,26	168,67%	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp1.864.511.000	Rp1.835.926.575	98,47%			98,47%	70,21%
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp1.864.511.000	Rp1.835.926.575	98,47%				
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp23.500.590.916	Rp22.021.324.790	93,71%				
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,022	0,1	454,55%	Urusan Penyelenggaraan PSU	Rp23.500.590.916	Rp22.021.324.790	100,00			93,71%	184,59%
						Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan	23.500.590.916,00	22.021.324.790,38	93,71%				

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran					Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2		4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
						Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian					
5	Meningkatnya Pelayanan Permukiman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	98	100	102,04%						
Rata-rata Capaian Kinerja			174,61%				Rp43.058.179.118	Rp39.010.937.135	90,60%	93,69%	55,00%
Total Belanja Langsung sesuai SIMONTEPRA			Rata-rata Capaian Anggaran								

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi	
			Target Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator		
1	2		4	5	6	8	10	11	12	13	14 (6-13)
Rata-rata Tingkat Efisiensi (Capaian Kinerja dikurangi Capaian Anggaran)											

Dibandingkan dengan kinerja pada capaian tahun 2021, maka realisasi anggaran sebesar 90,60% dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 174,61 %, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 55,00 %

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. yang diukur atas realisasi terhadap APBD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan Tahun 2021 (setelah perubahan), maka realisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.600.264.600,00	Rp. 2.383.745.725,00	91,67%
Belanja	Rp.43.058.179.118,00	Rp. 39.010.937.135,41	90,60%

Pagu dan Realisasi Pendapatan dan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2021 guna mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Perubahan yang terdiri atas Retribusi Penyewaan tanah dan bangunan adalah sebesar Rp. 2.600.264.600,00 (Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa dan Sewa Rumah Dinas) dan terealisasi sebesar Rp. Rp. 2.383.745.725,00 (Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa dan Sewa Rumah Dinas, Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat)
2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.39.010.937.135,41 dari anggaran Rp. 43.058.179.118,00 atau sebesar 90, 60 %

Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Tabel Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran				
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja per Indikator	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0	0	0	Program Kawasan Permukiman	Rp437.000.000	Rp404.783.470	92,63%	92,39%
						Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp437.000.000	Rp404.783.470	92,63%	
						Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Rp165.000.000	Rp151.596.370	91,88%	
						Pembentukan/Peminaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Permukiman Kumuh	Rp272.000.000	Rp253.187.100	93,08%	
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp1.853.467.000	Rp1.853.467.000	100,00%	
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.853.467.000	Rp1.853.467.000	100,00%							

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran				
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
						Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rp1.853.467.000	Rp1.853.467.000	100,00%	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp11.197.610.202	Rp9.465.256.193	84,53%	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.146.400.540	Rp5.530.482.355	89,98%	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.146.400.540	Rp5.530.482.355	89,98%	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp510.856.508	Rp455.693.317	89,20%	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp12.000.000	Rp11.682.000	97,35%	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp243.094.008	Rp203.795.150	83,83%	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp105.762.500	Rp90.915.000	85,96%	
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp150.000.000	Rp149.301.167	99,53%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran				
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp200.500.000	Rp196.552.400	98,03%	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp200.500.000	Rp196.552.400	98,03%	
						Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp686.114.404	Rp489.537.481	71,35%	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.500.000	Rp3.500.000	63,64%	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp231.525.000	Rp88.106.837	38,05%	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp449.089.404	Rp397.930.644	88,61%	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.653.738.750	Rp2.792.990.640	76,44%	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp60.375.000	Rp10.159.211	16,83%	
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp3.424.852.500	Rp2.624.209.836	76,62%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran				
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Rp168.511.250	Rp158.621.593	94,13%	
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	75	39,17	147,77%	Program Pengembangan perumahan	Rp4.155.000.000	Rp3.383.523.057	81,43%	90,19%
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	Rp3.900.000.000	Rp3.139.164.983	80,49%	
						Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Rp100.000.000	Rp97.851.800	97,85%	
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	Rp3.800.000.000	Rp3.041.313.183	80,03%	
						Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Rp255.000.000	Rp244.358.074	95,83%	
					Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Rp255.000.000	Rp244.358.074	95,83%		
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp50.000.000	Rp46.656.050	93,31%		
					Urusan Penyelenggaraan PSU	Rp50.000.000	Rp46.656.050	93,31%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran					
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator	
											4
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	
						Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	Rp50.000.000	Rp46.656.050	93,31%		
						Program Kawasan Permukiman	Rp1.864.511.000	Rp1.835.926.575	98,47%		
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Humi	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Humi	0,83	0,26	168,67%	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp1.864.511.000	Rp1.835.926.575	98,47%	98,47%	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Humi	Rp1.864.511.000	Rp1.835.926.575	98,47%		
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp23.500.590.916	Rp22.021.324.790	93,71%		
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,022	0,1	454,55%	Urusan Penyelenggaraan FSU	Rp23.500.590.916	Rp22.021.324.790	100,00	93,71%	
						Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	23.500.590.916,00	22.021.324.790,38	93,71%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran				
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	98	100	102,04%					
Rata-rata Capaian Kinerja			174,61%							
Total Belanja Langsung sesuai SIMONTEPRA			Rp43.058.179.118	Rp39.010.937.135	90,60%					93,69%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran				
			Target	Realisasi	% Capaian kinerja per Indikator	Program	Target	Realisasi	% capaian Anggaran	% capaian anggaran per Indikator
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
Rata-rata Capaian Anggaran										

C. Capaian Prestasi dan penghargaan

Tahun 2021, tidak terdapat penghargaan yang didapatkan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Bab IV. Penutup

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016-2021. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Perumahan dan Permukiman berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan secara umum target kinerja di tahun 2021 telah terlampaui.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Perumahan dan Permukiman. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman. Akhirnya, Dinas Perumahan dan Permukiman berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni, dan berkelanjutan menuju madinatul iman

TERIMA KASIH